

UPAYA TURKI DALAM PEMULIHAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL 2016

TURKEY'S EFFORT IN RECOVERING DIPLOMATIC TIES WITH ISRAEL 2016

Tengku Difari Akbar

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
difarii@gmail.com

Abstract

Turkey is a predominantly Muslim non-Arab country that supports Israel's independence. It is due to an ideology similarity between Turkey and Israel. On the basis of the ideology, Turkey ranging the cooperation from economic, military and political with Israel. However, for several years Turkey and Israel cooperation took place, in 2010 diplomatic relations between the two countries was cut off because of the attack of Turkish aid ship Mavi Marmara, where victims of the attack from Turkish civilians. After several years of severance of Turkish and Israeli diplomatic relations, by 2016 Turkey has improved diplomatic ties with Israel, citing the fulfillment of Turkey and Israel's national interests

Key Words: Turkey, Israel, Mavi Marmara Aid Ship, Diplomatic Relations, Economy, Military

Abstrak

Turki merupakan negara non-Arab mayoritas Muslim yang menudukung kemerdekaan Israel. Hal ini disebabkan adanya kesamaan ideologi antara Turki dengan Israel. Atas dasar tersebut Turki banyak melakukan kerjasama, mulai dari ekonomi, militer maupun politik dengan Israel. Akan tetapi selama beberapa tahun kerjasama Turki dan Israel berlangsung, pada tahun 2010 hubungan diplomatik kedua negara tersebut diputus karena adanya serangan kapal bantuan Turki Mavi Marmara, dimana korban dari serangan tersebut dari warga sipil Turki. Setelah beberapa tahun pemutusan hubungan diplomatik Turki dan Israel, pada tahun 2016 Turki kemudian memperbaiki hubungan diplomatik dengan Israel, dengan alasan pemenuhan kepentingan nasional Turki dan Israel.

Kata Kunci: Turki, Israel, Mavi Marmara, Hubungan Diplomatik, Ekonomi, Militer

PENDAHULUAN

Timur Tengah merupakan wilayah yang sebagian besar terdiri atas negara-negara Arab. Akan tetapi, ada juga beberapa negara di Timur Tengah yang merupakan negara non-Arab seperti Turki dan Israel. Meskipun bukan negara non-Arab, Turki dan Israel merupakan negara yang memiliki peranan dalam konflik di Timur Tengah. Karena seperti yang diketahui, Timur Tengah merupakan wilayah yang sering mengalami konflik. Sebagai contoh, pada tahun 2003 pemerintah Turki berperan sebagai mediator dalam konflik internal Syiah dan Sunni di Iraq. Mediasi ini membantu terbentuknya pemerintahan yang cukup majemuk di negara itu. Sementara Israel, adalah negara yang saat ini menjadi sorotan utama dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina.

Apabila membahas Turki dan Israel, kedua negara tersebut ternyata memiliki hubungan diplomatik yang baik. Turki juga merupakan negara mayoritas Muslim yang menyatakan kedaulatan Israel pada sekitar Maret 1949. Adapun alasan pertama Turki membangun kerjasama bilateral dengan Israel adalah karena ideologi liberal (barat) yang diterapkan pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu, setelah keruntuhan kekhalifahan Ottoman pada tahun 1923.

Alasan yang kedua adalah atas kepentingan masing-masing negara dalam hal perdagangan senjata militer.

Keuntungan yang didapatkan masing-masing negara antara Turki dan Israel menjadikan hubungan bilateral kedua negara semakin baik, sehingga pada tahun 1950 Turki dan Israel kemudian memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan antar kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral, baik dalam ekonomi, politik, militer bahkan perdamaian konflik antara Israel dan Palestina.

Kemudian berlanjut dengan adanya gejolak yang dilakukan oleh masyarakat Turki untuk memberikan rasa simpati mereka kepada Palestina. Ditambah lagi dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Adanya blokade-blokade tersebut menyebabkan sulitnya beberapa negara dan beberapa organisasi internasional untuk mengirmikan bantuan melalui jalur Gaza.

Atas serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dan banyaknya warga sipil yang menjadi korban, beberapa negara langsung mengambil tindakan untuk membantu konflik antar kedua

negara tersebut. Salah satu bantuan konkret yang telah dilakukan adalah mengirimkan kapal perdamaian Mavi Marmara. Mavi Marmara adalah sebuah kapal milik perusahaan pelayaran Turki, *Istanbul Fast Ferries Co. Inc.*, yang bertujuan untuk mengirimkan bantuan berupa 10.000 ton bahan makanan, mainan anak-anak, alat tulis, bahan bangunan, dan lain-lain. Mavi Marmara merupakan salah satu kapal yang tergabung didalam pelayaran "*Freedom Flotilla*". Atas dasar serangan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap kapal Mavi Marmara, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) langsung melakukan investigasi terhadap penyerangan tersebut. Sebelum laporan investigasi diumumkan, laporan tersebut lebih dahulu diketahui oleh masyarakat umum (bocor). Laporan berisikan bahwa, serangan yang dilakukan oleh militer Israel sangat berlebihan dan terindikasi melakukan tindakan kekerasan, sehingga menewaskan sepuluh aktivis Turki dan korban luka-luka lainnya. Berdasarkan laporan tersebut, pada tanggal 2 September 2011 Turki mengambil tindakan tegas untuk mengusir dan menyatakan *persona non grata* terhadap Duta Besar Israel beserta seluruh diplomat seniornya. Namun demikian, setelah enam tahun berhentinya hubungan diplomatik Turki dengan Israel, pada tanggal 27 Juni 2016 kemarin, kedua negara tersebut

mengumumkan untuk melakukan pemulihan hubungan diplomatik. Pemulihan ini sebenarnya secara diam-diam telah dilakukan antar kedua negara dari tahun 2013 dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam konferensi pers di Ankara pada tanggal 16 November 2016 kemarin menyatakan telah menunjuk Kemal Okem sebagai perwakilan diplomatik senior untuk mengisi jabatan duta besar di Israel. Sebaliknya, Israel juga telah menunjuk Eith Naeh sebagai perwakilan diplomatik untuk Turki.

Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri atau domestik sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri, salah satunya adalah sistem pemerintahannya. Apakah bersifat demokrasi atau autokrasi, terbuka atau tertutup, merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pembuatannya. Kemudian stabilitas negara dan kondisi negara juga menjadi pertimbangan utama. Yang perlu diingat bahwa politik dalam negeri hanyalah salah satu konsideran yang akan bekerja didalam kebijakan luar negeri dalam suatu negara.

Coplin membuat suatu fokus analisa hanya pada pengambil keputusan luar negeri dan aktor penting suatu negara, yang kemudian mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan luar negeri ataupun mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin juga memberikan istilah *policy influencer* bagi para aktor yang ambil bagian dalam suatu perumusan. Seorang pengambil keputusan harus mengingat kepentingan nasional, memiliki strategi, mengevaluasi dalam kebijakan luar negeri. Di beberapa negara, pemimpin negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) merupakan aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Apabila dilihat dari sistem pemerintahan Turki yang bersifat republik parlementer (demokrasi), dimana dalam hal ini parlemen, perdana menteri dan presiden memegang peranan penting dalam pembuatan keputusan luar negeri. Selanjutnya, Coplin mengkatagorikan *policy influencers* menjadi empat katagori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*.

Bureaucratic Influencer adalah individu ataupun organisasi didalam lembaga eksekutif yang membantu pembuat keputusan dalam membuat ataupun melaksanakan suatu kebijakan. Kemudian kelompok-kelompok birokratis

menjadi sangat berpengaruh apabila mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan.

Tipe yang kedua adalah *Partisan Influencer* yang merupakan mediator dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian diubah menjadi tuntutan yang bersifat politis, yaitu tuntutan kepada pengambil keputusan sebelum mengambil memutuskan suatu kebijakan.

Yang ketiga adalah *Interest Influencer*, yang didalamnya kelompok-kelompok orang yang bergabung bersama kedalam suatu rangkaian kepentingan, yang belum cukup luas untuk menjadi dasar bagi aktivitas suatu partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber dalam mendapat dukungan dari pengambil keputusan yang lain.

Kemudian yang terakhir adalah *Mass Influencer*, adalah opini-opini yang dimiliki oleh populasi, kemudian disampaikan kepada pengambil keputusan dalam menyusun sebuah kebijakan luar negeri. Dampak *mass influencers* dapat bermacam-macam tergantung kepada sistem politik yang dianut oleh suatu negara.

Jika melihat kondisi negara dan pemerintahan Turki, tipe *Bureaucratic influencer* adalah tipe yang tepat

digunakan dalam menganalisa politik dalam negeri Turki. Turki adalah negara dengan sistem parlementer, dimana presiden selaku kepala negara dan perdana menteri selaku kepala pemerintahan (eksekutif), dan adanya parlemen (legislatif). Akan tetapi, Presiden Turki disini tidak hanya sebagai simbol negara saja, seperti kebanyakan negara parlementer lainnya. Akan tetapi, Presiden Turki juga ikut dalam membuat suatu keputusan dan kebijakan. Presiden Turki juga memiliki kewenangan penuh dalam suatu persetujuan pembuatan keputusan. Akan tetapi, walaupun presiden mempunyai hak penuh dalam sebuah keputusan, perdana menteri dan parlemen (eksekutif dan legislatif) juga turut serta dalam pembuatan kebijakan di dalam maupun luar negeri. Dengan begitu peran pembuat keputusan Turki sangat didominasi oleh eksekutif.

Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam membuat suatu kebijakan luar negeri, seorang pembuat keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer negara. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, dan kelemahannya jika menyusun politik luar negeri.

Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer. Dapat diketahui bahwa ekonomi dan militer merupakan suatu kekuatan bagi suatu negara. Untuk melihat bagaimana suatu kondisi ekonomi negara, dapat dilihat dari GNP, GNP perkapita, dan neraca pembayaran suatu negara. Kemudian untuk melihat kondisi militer, dapat diketahui melalui penggunaan kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan kepada negara lain dan kestabilan internal suatu negara.

Setelah mempertimbangkan semua faktor tersebut, Coplin membagi negara menjadi dua kategori, negara maju dan negara terbelakang. Negara maju memiliki GNP yang lebih tinggi, memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi, angkatan bersenjata yang lebih modern dan canggih, serta terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini sangat berbeda dengan negara terbelakang yang memiliki GNP rendah, memiliki kapasitas produksi yang rendah dan bergantung kepada negara lain, kemudian angkatan bersenjata yang belum maju dan tidak terlatih dengan baik. Karena perbedaan kondisi negara ini, setiap negara pasti memiliki keputusan politik luar negeri yang berbeda. Negara

maju memiliki militer yang sewaktu-waktu dapat menyerang negara terbelakang, dan juga dapat memanipulasi kondisi ekonominya. Sehingga negara maju akan cenderung menang apabila terjadi perang.

Konteks Internasional

Dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, Coplin membaginya menjadi tiga elemen, yaitu geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara, juga terdiri atas negara yang didudukinya. Dalam hal hubungan politik dan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya. Dalam menganalisa keputusan Turki melakukan pemulihan hubungan diplomatik terhadap Israel dikarenakan Israel menyepakati kompensasi yang diajukan Turki atas serangan Kapal Mavi Marmara. Ekonomi dan militer juga mempengaruhi alasan dibalik pemulihan diplomatik. Oleh sebab itu, Turki ingin adanya kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik terhadap Israel, dengan harapan kembalinya hubungan bilateral antar kedua negara tersebut seperti sebelumnya. Kemudian adanya dorongan dari Amerika Serikat kepada Turki dan Israel dalam mencapai perdamaian. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara yang menjalin kerjasama internasional dengan Turki dan juga Israel.

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Turki memiliki keuntungan karena letak geografisnya yang sangat strategis. Oleh sebab itu banyak yang menyebut Turki sebagai negara *bridge country*, karena berada diantara dua benua. Maksud dari Turki sebagai negara *bridge country* adalah karena Turki memiliki sisi ideal dalam hal politik luar negerinya, dikarenakan politik luar negeri Turki yang tidak hanya memandang satu sisi saja, tetapi dari berbagai macam pandangan.

Turki merupakan negara dengan lokasi geografis strategis, yang terletak diantara sisi barat dan timur, dengan kata lain Turki mengadaptasi pandangan Muslim dan juga barat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa Turki memiliki banyak kesempatan dalam membangun dan menjalankan politik luar negerinya dengan negara-negara di Asia ataupun Eropa. Namun pada kenyataannya, dalam menjalin kerjasama luar negeri, ada banyak dinamika yang mempengaruhi politik luar negeri Turki didalamnya. Termasuk politik luar negeri Turki yang sangat kontroversial dengan Israel. Dimulai pada tahun 2002, Turki sudah memulai untuk menyusun strategi-strategi dalam politik luar negerinya, dan memulai untuk mencari keuntungan dari letak geografisnya, mengingat posisi strategis yang dimiliki Turki. Ada lima prinsip Turki dalam menjalankan politik

luar negerinya. Yang pertama, jika tidak ada keseimbangan antara demokrasi dan keamanan, akan sangat sulit mengembangkan bagi suatu negara dan wilayah disekitarnya. Diperlukannya rasa aman dan nyaman bagi penduduk suatu negara, dengan tidak mengorbankan kebebasan dan hak asasi rakyat. Pada tahun 2002, Turki telah membebaskan segala hak bagi penduduknya, dan menghapuskan segala tekanan didalam negaranya.

. Yang kedua, adanya kebijakan, “*zero problem policy toward Turkey’s neighbors*”. Kebijakan ini sukses diimplementasi oleh Turki, karena Turki berusaha untuk membangun relasi yang baik antar negara-negara Tetangganya. Seperti hubungan Turki dengan Suriah dan Georgia. Kedua negara tersebut sama-sama bekerjasama dalam hal ekonomi dan transportasi, dan juga dalam hal-hal yang lainnya. Adanya kerjasama-kerjasama tersebut menjadikan negara tetangga Turki menjadi sangat percaya untuk bekerjasama dengan Turki.

Prinsip yang ketiga adalah, Turki terus berusaha untuk terus mengembangkan serta menambah kerjasama dengan negara-negara disekitarnya. Seperti pada saat permasalahan Bosnia-Herzegovina, Turki aktif dalam ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Hal itu menjadi salah satu jembatan untuk Turki hadir di wilayah Eropa. Setelah itu Turki berusaha untuk membangun infrastruktur dalam membantu NATO, negara-negara di Eropa dan negara barat lainnya. Akan tetapi, masih ada sedikit kesulitan bagi Turki untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah. Hal ini karena adanya faktor permasalahan suku Kurdi didalamnya.

Yang keempat adalah, Turki berusaha untuk memperbaiki dan mematuhi multi-dimensi politik luar negeri yang telah dibangun. Misalnya, hubungan politik luar negeri Turki dengan Amerika Serikat, dan juga melalui NATO, proses keanggotaan Turki di Uni Eropa, pembangunan kerjasama dengan Rusia, dilakukan untuk saling melengkapi, bukan untuk berkompetisi. Hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan kerjasama Turki dengan beberapa negara yang ada disekitarnya.

Prinsip yang kelima adalah, adanya diplomasi berirama yang dilakukan Turki dalam menajalakan politik luar negerinya. Yang dimaksud dari diplomasi berirama Turki adalah, Turki aktif dalam berbagai pertemuan internasional dan mengambil peran inti didalamnya. Sebagai contoh, dalam pertemuan NATO dan OKI, Turki menjadi salah satu negara yang dianggap penting untuk turut serta dalam

mengambil kebijakan ataupun keputusan. Kemudian pada tahun 2007, Turki memiliki status negara pengamat di kawasan Uni Afrika. Hal ini terjadi karena Turki memiliki keterbukaan politik luar negeri dengan negara-negara di Afrika. Adapun kebijakan luar negeri Turki yang sudah mulai terbuka dengan negara lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebebasan kepada setiap rakyatnya, membuat Turki memiliki kemajuan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Adanya kegiatan diplomasi yang dimulai sejak tahun 2002 bahkan hingga saat ini, membuat Turki menikmati kondisi negaranya yang banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.

Dalam melaksanakan politik luar negeri, Turki sudah banyak membantu dalam menjaga kestabilan dan perdamaian di kawasan sekitar Turki. Hal ini yang menyebabkan Turki dipandang sukses dalam melaksanakan politik luar negerinya, hal ini sudah berlangsung semenjak Kerajaan Ottoman. Akan tetapi setelah kekuasaan Ottoman runtuh, Turki kemudian diambil alih pemerintahannya oleh Mustafa Kemal Pasha Attaturk. Attaturk mengubah wajah Turki yang semula merupakan negara Islam, kemudian berubah menjadi negara republik yang berhaluan sekuler. Adapun yang dilakukan oleh Attaturk ini disebut sebagai Kemalisme. Kemalisme ini

merupakan perubahan pemahaman anti-USmaniyah dan anti-Islamisme. Banyak yang berasumsi bahwa sebelum adanya pemahaman Islam di Turki, modernisme dan demokrasi merupakan pemahaman awal yang berkembang di Turki. Akan tetapi karena Ottoman masuk menguasai Turki dengan pemahaman Islam, maka pemahaman modern dan demokrasi itu menghilang. Oleh sebab itu, pada rezim Attaturk militer sangatlah mendominasi dalam segala aspek pemerintahan di Turki pada saat itu.

Jika dapat disimpulkan melalui penjelasan sebelumnya, Turki merupakan negara yang sangat fleksibel dan rasional dalam menjalankan politik luar negerinya. Hal ini juga sesuai dengan pemahaman Morgenthau mengenai kepentingan nasional suatu negara.

Dapat dimengerti, dari awal pemerintahan pada saat rezim Attaturk wajah Turki dibawa menjadi sangat sekuler dan terkesan mengikuti pemahaman Barat. Hal ini didasari karena setelah runtuhnya kekuasaan Ottoman, pemerintahan Turki yang sebelumnya menganut pandangan Islam, kemudian diubah menjadi sekuler karena dianggap sangat rasional pada saat itu. Akan tetapi, pemahaman sekuler atau barat yang dibawa Attaturk ini banyak tidak disukai oleh warga Turki karena terkesan adanya dominasi militer dan banyak warga Turki

yang mengalami tekanan, serta terkesan memaksa atas rezim Attaturk. Kemudian setelah dari rezim Attaturk, pemerintahan selanjutnya dipegang oleh rezim AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*), yang dipimpin dibawah pemerintahan Erdogan. Pada era AKP, banyak warga Turki yang merasakan kemanan yang sangat tinggi dan berhasil mengubah Turki menjadi lebih sejahtera. Adanya kesan fleksibel yang dibawa oleh Erdogan ini menjadikan Turki harus mengikuti perkembangan dunia yang lebih cepat. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu tujuan untuk Turki dalam menjalankan politik luar negerinya.

Adanya kesan fleksibel dan rasional jika dapat dikorelasi dengan pandangan Morgenthau, politik luar negeri yang dibawa oleh Attaturk dan rezim AKP sama-sama bersifat rasional dan fleksibel. Akan tetapi yang membedakannya hanya pandangan sekuler yang dibawa oleh Attaturk tidak berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan rezim AKP berhasil menjawab keinginan masyarakat terhadap wajah Turki yang baru, dan tidak ada kesan memaksa serta mengalami tekanan.

Dapat diketahui bahwa hingga saat ini, arah politik luar negeri dibawah pemerintahan Erdogan masih berdasarkan kepada membangun relasi sebanyak-

banyaknya dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan istilah dalam berdiplomasi bahwa seribu teman terlalu sedikit, dan satu musuh itu sudah terlalu banyak. Akan tetapi, hubungan diplomatik Turki dengan beberapa negara saat ini sedang mengalami kesulitan, terutama dengan Amerika Serikat dan juga dengan negara-negara di Uni Eropa. Turki memainkan peran diplomasi dengan sedikit beresiko dan tidak dapat dimengerti banyak pihak. Kesulitan tersebut ditambah lagi dengan persoalan dalam negeri yang sedikit bergejolak karena permasalahan separatis Kurdi, serta permasalahan kepada rakyat Gaza yang secara tidak langsung menjadi tanggung jawab Turki sendiri. Oleh sebab itu, Turki memiliki keinginan untuk segera memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara, termasuk dengan Israel, dalam menyelesaikan permasalahan diplomatik yang ada.

Kerjasama Militer

Dapat diketahui bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Adanya kerjasama dengan negara lain harus dilakukan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, baik itu politik, ekonomi, ataupun pertahanan. Dalam hal ini, Turki harus memperbanyak “mitra” dalam hal kerjasama, terutama ekonomi

dan militer. Israel merupakan satu-satunya negara kontroversial yang menjadi mitra dekat Turki dalam hal ini. Dalam hal militer, pemerintah Turki sebelumnya telah menyetujui adanya kerjasama pelatihan militer atau yang disebut dengan *Military Training Cooperation Agreement* (MTCA). Adapun pelatihan militer ini disepakati pada bulan Februari 1996, dan ini merupakan awal mula dari hubungan baik Turki dengan Israel. Pelatihan ini memungkinkan untuk kedua negara melakukan latihan terbang angkatan udara yang melewati batas-batas negara selama empat kali setahun. Setelah adanya pelatihan angkatan udara, MTCA ini memungkinkan untuk berlanjut ke pelatihan angkatan laut bahkan darat, di kedua negara. Dari adanya pelatihan angkatan bersenjata (MTCA), kerjasama berlanjut dengan adanya keinginan dalam mitra industri pertahanan yang kemudian ditandai dengan adanya penandatanganan kesepakatan kerjasama industri pertahanan, atau yang disebut dengan *Defence Industry Cooperation Agreement* (DICA). Adapun kerjasama yang industri pertahanan ini dilakukan setelah enam bulan dari penandatanganan MTCA. Kedua kerjasama tersebut kemudian membuat hubungan diplomatik Turki dan Israel semakin baik.

Military Training Cooperation Agreement adalah kesepakatan ketiga kalinya yang dibuat antara Turki dengan Israel, setelah adanya Kesepakatan Keamanan dan Kerahasiaan (*Security and Secrecy Agreement*) pada bulan Maret 1994, serta adanya Note Kesepahaman untuk Pelatihan Pilot (*Memorandum of Understanding for the training of pilots*) pada September 1995. Berdasarkan kerjasama MTCA mempunyai tujuan untuk meningkatkan kerjasama dan dapat membuat kedua negara menjadi mitra yang baik kedepannya.

Setelah tercapainya kerjasama MTCA, selanjutnya pada tanggal 7 Januari kedua negara sepakat untuk melakukan pelatihan gabungan dalam meningkatkan keamanan strategis Turki maupun Israel. Kemudian kerjasama ini juga dilakukan dalam membuat hubungan diplomatik kedua negara, untuk saling mempercayai satu sama lain. Selanjutnya dalam kerjasama militer, pesawat tempur F-16 Israel pertama kali mengunjungi Turki dalam hal latihan militer. Dua minggu setelah kunjungan Israel, Turki juga melakukan kunjungan balasannya di Israel. Adapun dampak dari kerjasama militer dalam pelatihan terbang antar kedua negara, sangat menguntungkan bagi Israel, mengingat kawasan Israel yang sangat kecil dan sulit untuk melakukan pelatihan

angkatan udara. Oleh sebab itu, Israel sangat memanfaatkan momentum ini, mengingat Israel dapat menggunakan wilayah Turki untuk latihan angkatan udara Israel sendiri. Kemudian kedua negara meningkatkan perwakilan militer di masing-masing ibu kota. Contohnya pada penempatan atase militer Turki di Tel Aviv, dan begitu juga sebaliknya. Kerjasama ini semakin memeplihatkan bahwa kedua negara sama-sama menikmati kerjasama militer yang dilakukan, dan membawa dampak baik terhadap Turki maupun Israel.

Kemudian, dengan adanya MTCA tidak hanya dalam hal peningkatan militer saja, tetapi juga mengatur untuk pertukaran delegasi militer, latihan gabungan angkatan udara dan laut hingga pembahasan kerjasama pertahanan. Adapun dari MTCA, Turki mendapatkan bantuan senilai \$ 650 dari Israel, dalam memperbaharui pesawat tempur F-4 Phantom milik Turki. Kesepakatan untuk bantuan ini sempat terhenti sebelumnya dan dilanjutkan kembali pada bulan Desember 1996, yang sekaligus juga memperbaiki alat-alat navigasi pesawat tempur F-4 Phantom Turki, instalasi sistem avionik canggih seperti radar dan kemampuan *electronic warfare*. Dalam hal pemenuhan alat-alat militer Turki, Turki telah menyerahkannya terhadap satu

perusahaan milik Israel. Perusahaan tersebut telah berhasil memenangkan tender senilai 668 juta dolar Amerika Serikat, untuk memperbaharui 170 tank M60. Kemudian pada tahun 2005, ada satu proyek pembuatan 10 pesawat tanpa awak dan peralatan pengintai yang dipimpin oleh *Israel Aerospace Industries*. Israel juga membantu pengadaan militer Turki dengan menjual peralatan elektronik dan roket ke Turki. Kerjasama militer Turki dan Israel kemudian berlanjut dengan mengadakan latihan perang yang juga terdapat Amerika Serikat didalamnya, yang disebut dengan latihan perang *Reliant Mermaid X*, di kawasan Mediterania. Adapun tujuan dari latihan perang ini untuk koordinasi dalam pencarian dan penyelamatan dalam keadaan darurat. Latihan perang *Reliant Mermaid X* ini melibatkan delapan kapal perang, empat helikopter dan tiga pesawat terbang untuk operasi penyelamatan.

Setelah melakukan kerjasama militer dan Israel menjadi mitra yang baik didalamnya, kerjasama antar kedua negara tersebut berhenti pada saat adanya penyerangan terhadap kapal bantuan Turki Mavi Marmara pada tanggal 31 Mei 2010. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa didalam kapal Mavi Marmara terdapat aktivis Turki dan beberapa aktivis dunia lainnya yang menjadi korban.

Adapun hasil dari penyerangan yang dilakukan oleh Israel tersebut menyebabkan hubungan diplomatik Turki dengan Israel menjadi lebih buruk. Deputi Perdana Turki Bulent Arinc mengatakan bahwa pemerintah Turki telah memutuskan dan juga membatalkan tiga latihan militer dengan Israel. Keputusan tersebut diambil karena protes Turki atas penyerangan kapal bantuan Turki Mavi Marmara, untuk Gaza. Pada saat itu, Recep Tayyip Erdogan yang menjabat sebagai perdana menteri sedang sedang kunjungan kenegaraan di Amerika Latin, saat terjadinya penyerangan kapal Mavi Marmara. Bulent Arinc juga menyatakan bahwa saat itu Erdogan langsung membatalkan kunjungannya dan kembali ke Turki saat mendengar adanya penyerangan tersebut.

KESIMPULAN

Antara Turki dengan Israel telah memiliki hubungan diplomatik sejak lama, yang diawali dengan Turki sebagai negara mayoritas Muslim yang menyatakan kedaulatan Israel pada sekitar Maret 1949. Adanya alasan pertama Turki membangun kerjasama bilateral dengan Israel adalah karena ideologi liberal (barat) yang diterapkan pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada saat itu, setelah keruntuhan kekhalifahan Ottoman pada tahun 1923.

Kemudian pada tahun 2002, Turki sudah memulai untuk menyusun strategi-strategi dalam politik luar negerinya, dan memulai untuk mencari keuntungan dari letak geografisnya, mengingat posisi strategis yang dimiliki Turki, dan Israel menjadi salah satu mitra dalam bekerjasama.

Seperti yang diketahui bahwa Palestina dan Turki mengalami konflik setelah adanya serangan Mavi Marmara pada tahun 2010 di perairan Gaza. Hal ini membuat warga Turki marah dan mengecam tindakan Israel. Oleh sebab itu, pemerintah Turki langsung menghentikan segala kerjasama yang telah dilakukan dengan Israel, termasuk kerjasama ekonomi dan militer. Turki mengusir duta besar Israel, dan menarik duta besarnya dari Israel. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan Turki atas Israel, mengingat banyaknya warga Turki yang menjadi korban dalam Mavi Marmara.

Namun, setelah beberapa tahun berlangsung dan banyaknya pertimbangan, kedua negara sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik pada tahun 2016. Kondisi ekonomi Turki yang bersifat fluktuatif membuat Turki memerlukan mitra dalam mendorong ekonominya. Dalam hal ini Israel menjadi satu-satunya negara yang berpotensi untuk mendorong ekonomi Turki. Kemudian dengan kondisi militer Turki yang

sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup, tetap memerlukan bantuan Israel dalam membantu dan melengkapi kebutuhan persenjataan militer Turki.

Adanya alasan mengenai pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Turki terhadap Israel kemudian menjadi poin penting dalam penelitian ini. Melalui teori pengambilan kebijakan luar negeri Willam D, Coplin, aspek politik dalam negeri, kondisi ekonomi, militer dan konteks internasional digunakan sebagai tolak ukur dalam mencari tahu alasan Turki melakukan normalisasi. Dalam aspek politik dalam negeri, parlemen sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, yang juga harus diiringi dengan keputusan presiden republik. Dalam sistem parlementer, adanya keperluan konsensus dan pertimbangan yang besar melalui presiden merupakan hal yang mutlak bagi pengambilan kebijakan politik luar negeri Turki sendiri.

Kemudian yang terakhir adalah aspek internasional. Adanya tekanan dari Amerika Serikat dianggap sebagai konteks internasional yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Turki terhadap Israel. Adanya tekanan yang diberikan kepada kedua negara menyebabkan Turki

mempertimbangkan untuk memperbaiki hubungan diplomatik Turki dengan Israel.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan parlemen dan pertimbangan presiden, kondisi ekonomi Turki yang bersifat fluktuatif, adanya keinginan Turki dalam menambah kekuatan militer, dan adanya tekanan dari Amerika Serikat menjadi alasan bagi Turki dalam melakukan hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Coplin, William D. *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Akca, Ismet. *Military-Economic Structure in Turkey: Present Situation, Problems and Solutions*. Istanbul: Tesev Publication, 2010
- Morgenthau, H.J. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Plano, Jack. C. & Olton, Roy. *The International Relations Dictionary*, Terj. Wawan Juanda. England: Clio Press Ltd, 1982
- Davutoglu, Ahmed. *Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007**, Insight Turkey, Volume 10 No.1, 2008
- Pahlevi, Reza. *Kebijakan Turki Memutus Kerjasama Militer Dengan Israel Pada Era Pemerintahan Erdogan*, Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya
- Putri Handayani, Amalia. *Kebijakan Turki Memutuskan Kerjasama Militer Dengan Israel*

Tahun 2010, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Februari 2012

Prof. Dr. Bambang Cipto, Ma., *Dunia Islam dan Masa Depan Hubungan Internasional di Abad 21*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2011

Turk Recep, 2011, Feasibility of Presidential System in Turkey, *TJP Turkish Journal of Politics Vol.2 No.1 Summer*.

Nila Febri Wilujeng, *Sistem Pemerintahan Republik Turki*, Makalah, 03 Februari 2016

Website

- Reuters, CNN Indonesia. "Israel-Turki Resmi Normalisasi Hubungan." 28 Juni 2016.
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160628081733-120-141430/israel-turki-resmi-normalisasi-hubungan/> (diakses 7 Desember 2016).
- Radio Australia. "Turki Mengusir Dubes Israel." 21 Desember 2011.
<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2011-09-03/turki-mengusir-dubes-israel/93112> (diakses 2 Desember 2016).
- Maulana, Viktor. "Rujuk, Turki Tunjuk Dubes Baru untuk Israel." 16 November 2016.
<http://international.sindonews.com/read/1155893/43/rujuk-turki-tunjuk-dubes-baru-untuk-israel->

- 1479295836 (diakses 7 Desember 2016).
- Onim, Abdillah. "Catatan 5 Tahun Tragedi Mavi Marmara, Taruhan Nyawa." 1 Juni 2015.
<https://www.annah.com/news/2015/06/01/catatan-5-tahun-tragedi-mavimarmara-taruhan-nyawa.html>. (diakses 8 November 2016).
- Beriker, Nimet. "Turki, Bintang Terang Baru dalam Politik Timur Tengah?" 27 Maret 2009.
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25121&lan=ba&sp=0> (diakses 23 Desember 2016).
- Desriana Utami, Ni Luh. "Dampak Pertistiwa Mavi Marmara terhadap Hubungan Diplomatik Turki Israel." 2015.
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57673/Ni%20Luh%20Desriana.pdf?sequence=1>. (diakses 23 Desember 2016).
- Sitairesmi S Soekanto, "Politik Luar Negeri Turki Pasca Kudeta", <http://doktor-politik-ui.net>. (diakses pada 12 April 2017)
- Perbaiki Hubungan Diplomatik, Turki dan Israel Lanjutkan Pembicaraan,
<http://internasional.kompas.com>. (diakses pada 13 April 2017)
- Economic and Commercial Relations with Israel, <http://www.mfa.gov.tr/economic-and-commercial-relations-with-israel.en.mfa>, (diakses pada 19 April 2017)
- Ini Alasan Presiden Turki Erdogan Bekerjasama dengan Israel,
<https://m.tempo.co/read/news/2016/07/19/117788829/ini-alasan-presiden-turki-erdogan-bekerjasama-dengan-israel>, (diakses pada 22 Juni 2017)
- Erdogan Talks of Positive Impact of Improved Turkey-Israel Ties
<http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Erdogan-talks-of-positive-impact-of-improved-Turkey-Israel-ties-437268>, (diakses pada 22 Juni 2017)
- Penghentian Blokade Gaza, Syarat Turki Bagi Pemulihan Hubungan Israel,
<https://duniatimeng.com/penghentian-blokade-gaza-syarat-turki-bagi-pemulihan-hubungan-israel/>, diakses pada 22 Juni 2017
- Butuh Gas, Alasan Turki Berdamai dengan Israel,
<http://m.viva.co.id/berita/dunia/713465-butuh-gas-alasan-turki-berdamai-dengan-israel>, diakses pada 24 Juni 2017

Constitution Of The Republic Of Turkey,
<http://confinder.richmond.edu/> ,
(diakses pada 14 Juli 2017)

All You Need To Know About the Israel-
Turkey Reconciliation,
[http://www.haaretz.com/israel-
news/1.727208](http://www.haaretz.com/israel-news/1.727208), (diakses pada 28 Juni
2017)

Turkey, Israel To Try To Finalize Gas
Deal By Year End,
[http://www.worldbulletin.net/news/
191766/turkey-israel-to-try-to-finalize-
gas-deal-by-year-end](http://www.worldbulletin.net/news/191766/turkey-israel-to-try-to-finalize-gas-deal-by-year-end), (diakses
pada 28 Juni 2017)

Turkish Energy Minister 'To Visit Israel
For Pipeline Deal',
[http://www.timesofisrael.com/turki-
sh-energy-minister-to-visit-israel-for-
pipeline-deal/](http://www.timesofisrael.com/turkish-energy-minister-to-visit-israel-for-pipeline-deal/), (diakses pada 28
Juni 2017)

Gaza Terima Bantuan Pertama Dari Turki,
[http://www.antaranews.com/berita/
571586/gaza-terima-kiriman-bantuan-
pertama-dari-turki](http://www.antaranews.com/berita/571586/gaza-terima-kiriman-bantuan-pertama-dari-turki), (diakses pada
28 Juni 2017)

Turkish Aid Ship to Gaza, The First in Six
Years, Docks in Israel,
[http://www.newsweek.com/turkish-
aid-ship-gaza-first-six-years-docks-
israel-477331](http://www.newsweek.com/turkish-aid-ship-gaza-first-six-years-docks-israel-477331), (diakses pada 28
Juni 2017)

Mengenal Sistem Pemerintahan Turki,
[http://www.turkishspirits.org/2016/
03/mengenal- sistem-pemerintahan-
turki.html](http://www.turkishspirits.org/2016/03/mengenal-sistem-pemerintahan-turki.html), (diakses pada 12 Juli
2017)

Turkish Parliament Approves Israel
Reconciliation Deal,
[http://www.thejakartapost.com/ne-
ws/2016/08/20/turkish-parliament-
approves-israel-reconciliation-
deal.html](http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/20/turkish-parliament-approves-israel-reconciliation-deal.html), (diakses pada 3 Agustus 2017)

Turkish Parliament Approves Deal
Ending Rift with Israel,
[http://www.reuters.com/article/us-
turkey-israel-idUSKCN10V09Z](http://www.reuters.com/article/us-turkey-israel-idUSKCN10V09Z),
(diakses pada 4 Agustus 2017)

Turkey Military Strength,
[http://www.globalfirepower.com/country-
military- strength-
detail.asp?country_id=turkey](http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=turkey), (diakses
pada 4 Agustus 2017)

Militer Turki Satu Yang Terbesar di
Dunia,
[http://www.beritasatu.com/dunia/3
74935-militer-turki-salah-satu-yang-
terbesar-di-dunia.html](http://www.beritasatu.com/dunia/374935-militer-turki-salah-satu-yang-terbesar-di-dunia.html), (diakses
pada 6 Agustus 2017)

Turki Lanjutkan Kerja Sama Militer
dengan Israel,

<http://news.okezone.com/read/2013/02/20/412/764537/turki-lanjutkan-kerja-sama-militer-dengan-israel>,
diakses pada 6 Agustus 2017

Presiden Obama Mediasi Perdamaian
Israel-Turki,

<https://www.voaindonesia.com/a/obama-mediasi-perdamaian-israel-turki/1627093.html>, (diakses pada
7 Agustus 2017)